Pj Heru Tanggapi Peringatan Komnas HAM Soal Penertiban Hutan Kota Cawang

JAKARTA (IM) - Komnas HAM menyebut penertiban yang dilakukan Pemprov DKI terkait lokasi berkumpul komunitas LGBT di Hutan Kota Cawang, Jalan Perindustrian, Jakarta Timur, berpotensi melanggar HAM. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun memberi tanggapan terkait persoalan tersebut.

"Gini ya, taman itu untuk berinteraksi yang positif, ya sudah warga lakukan saja di taman dengan berinteraksi secara positif. Jika punya Pemprov DKI melalui Kasatpol PP menindak warga artinya warga itu adalah melakukan tindakan perbuatan-perbuatan negatif. Sudah jawabannya itu saja," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Jumat (28/7).

Heru mencontohkan, penindakan itu sepertinya halnya orang buang sampah sembarangan. Hal tersebut akan ditindak oleh Pemprov DKI karena ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019.

Perda tersebut mengatur, setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500 ribu.

"Yang membuat masyarakat kurang nyaman seperti ada yang teriak-teriak di taman, itu juga bisa kita imbau. Sudah jawabannya itu. Silakan warga berinteraksi secara positif," kata Heru.

Dia menjelaskan, Satpol PP tetap akan melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Heru mencontohkan lagi seperti parkir motor di taman juga bisa ditindak. Jika hal itu terjadi berarti warga tersebut tidak melakukan hal yang positif.

"Misalnya lagi nih, saya dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta main di sebuah taman kalau saya pakai musik dan main gitar keras-keras, Satpol PP juga bakal tindak. Seperti 'Pak jangan keras-keras dong jangan pakai musik'," kata Heru.

Dia pun mengimbau warga agar berinteraksi secara positif di taman yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI. Hal itu karena taman merupakan fasilitas untuk umum, khususnya keluarga dan anak-anak, bukan disalahgunakan untuk aktivitas tertentu. "Sekali lagi silakan melakukan hal yang positif," kata Heru.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara mengenai rencana Pemprov DKI yang berencana menertibkan hutan kota di Cawang. Lokasi itu diduga tempat berkumpulnya lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Komnas HAM mengingatkan rencana Pemprov DKI Jakarta itu berpotensi melanggar HAM. Belakangan ini, Hutan Kota UKI Cawang di Jakarta Timur viral di media sosial karena dinarasikan sebagai 'sarang' LGBT.

"Saya ingatkan Pj Gubernur DKI untuk tidak melakukan upaya-upaya yang mengarah pada praktik diskriminasi dalam akses pelayanan publik yang ada di DKI Jakarta karena itu bisa berpotensi melanggar HAM," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, Kamis (27/7). ● **yan**

IDN/ANTARA

PELUNCURAN BMW X1 GENERASI TERBARU

(ki-ka) Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania, Head of Government Affairs & Communications BMW Group Region Asia-Pacific, Middle East, Eastern Europe, and Africa Manuel Sattig, President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan dan Vice President Sales and Network Development BMW Group Indonesia Bayu Riyanto berbincang di dekat mobil BMW X1 generasi ketiga saat diluncurkan di Jakarta, Jumat (28/7). BMW Group Indonesia resmi meluncurkan generasi terbaru BMW X1 yang dijual dengan harga Rp877 juta off the road.

DPRD DKI Minta PPDB Jalur Zonasi Dikaji Kembali

Anggota DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma meminta agar ada kajian kembali agar Pemprov DKI bisa memenuhi jumlah sekolah seluruh jenjang di tiap wilayah. Katakan kalau SD dalam wilayah ada 7 dalam satu kecamatan, berarti dalam kecamatan itu harus ada 3 SMP atau 4 SMP, atau ada 2 SMA, katanya.

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengkaji kembali jalur zonasi pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Menurut dia akan sulit untuk mengimplementasikan jalur zonasi di Ibu Kota secara murni.

Faktor pertama penyebabnya adalah jumlah sekolah yang tidak merata di semua jenjang. Merry yang juga anggota Fraksi PDIP mengaku sudah memprotes jalur zonasi sejak awal sistem itu diterapkan.

"DKI Jakarta itu pemerataan antara sekolah SMA, SMP, SD itu tidak sama sehingga akan banyak korban anak siswa, pasti akan banyak korban di zonasi itu. Itu sudah pasti," kata Merry, Jumat (28/7).

Ia pun meminta agar ada kajian kembali agar Pemprov DKI bisa memenuhi jumlah sekolah seluruh jenjang di tiap wilayah.

"Katakan kalau SD dalam wilayah ada 7 dalam satu kecamatan, berarti dalam kecamatan itu harus ada 3 SMP atau 4 SMP, atau ada 2 SMA.

"Namun, saat ini fakta di lapangan tidak demikian. Di sisi lain, jalur zonasi juga rawan tidak adil karena akses jalan dan bentuk tempat tinggal di Jakarta. Bila di daerah lain lebih banyak rumah tapak, di Jakarta banyak apartemen hingga rusun yang menyulitkan diterapkannya jalur zonasi. Selain itu, meskipun terlihat rumah warga berdekatan dengan sekolah, jarak tempuhnya melalui akses transportasi dan jalan justru berjauhan sehingga dalam sistem tidak akan lolos jalur zonasi. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah membagi skema zona dalam jalur zonasi PPDB.

"Di Jakarta zonasi prioritas SD itu diperuntukkan bagi PPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Kemudian untuk SMP dan SMA itu terbagi menjadi zona prioritas, karena untuk SMP dan SMA kan tidak semua kelurahan ada sekolah negerinya," ujar Purwosusilo.

Dia mengakui kondisi geografis Jakarta memang berbeda seperti kepadatan penduduk yang tinggi hingga banyaknya perumahan vertikal.

"Contoh anak di sebelah kiri rel kemudian sekolah di sebelah kanan rel kalau jaraknya ditarik hanya 200 meter. Tapi untuk menuju ke sekolah itu lintasannya jauh. Kemudian antar rumah dengan sekolah dipisahkan gedung kan nggak bisa lewat gedung karena akses.

"Untuk itu dasar penentuan zonasi adalah dari basis kewilayahan RT dengan penentuannya bukan jarak rumah ke sekolah tetapi jarak akses transportasi. "Untuk SMP dan SMA itu ada tiga zona prioritas yakni pertama yaitu PPDB yang satu RT yang sekolah dan RT-nya berbatasan dengan sekolah. Zona kedua, ada PPDB yang tidak se-RT dan tidak berbatasan tapi di sekitaran sekolah. Nah, zona prioritas kedua ini ditentukan oleh sekolah, RT, RW, dan kelurahan melalui pemetaan secara bersama-sama. Sisanya adalah zona prioritas tiga," ujarnya.

Dengan adanya zona-zona ini, meskipun di kelurahan tersebut tidak ada SMP maupun SMA negeri, peserta didik tetap bisa berpotensi diterima lewat jalur zonasi. ● **yan**

Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai 1B Ditargetkan Sampai Pramuka 2024

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan kelanjutan proyek LRT Jakarta fase 1B sampai Manggarai akan dibangun secara bertahap. Ditargetkan, LRT Jakarta sudah terbangun fisiknya hingga Pramuka pada 2024.

Menurutnya, pembangunan secara bertahap ini dipilihnya agar LRT Jakarta bisa segera beroperasi untuk melayani masyarakat serta untuk mengurangi kemacetan. Pembangunan bertahap ini juga untuk melanjutkan proyek LRT Jakarta dari Pramuka ke Manggarai yang membutuhkan waktu lebih lama.

"Targetnya 2024, bulannya tidak bisa saya sampaikan tapi sudah terlihat perjalanan fisiknya. Bisa kita maksimalkan sebelum flyover Pramuka. Jadi di situ bisa kita fungsikan dulu, dari Rawamangun sampai situ. Minimal sampai situ karena konstruksi lanjutan dari perempatan Pramuka sampai Manggarai perlu effort konstruksi," ujar Heru di Balai Kota, Jumat (28/7).

Sementara itu, peresmian peletakkan batu pertama *(groudbreaking)* pembangunan LRT Jakarta fase 1B rencananya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan depan.

"LRT kita harapkan Agustus atau September ini paling lambat *groundbreaking*. Jadi kalau Agustus sudah *groundbreaking* ya sekarang lelangnya sedang berjalan," ungkap Heru.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Setda DKI Bidang Perekonomian dan Keuangan, Sri Haryati mengatakan saat ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sedang mempersiapkan dokumen pelaksanaan. Lelang persinyalan, 'rolling stock', dan persiapan sistem perkeretaapian akan dibarengi dengan pembangunan infrastrukturnya. Uji coba parsial ditargetkan pada September 2024. Sementara untuk uji coba terbatas akan dilaksanakan pada Juni 2026.

"Tapi insyaallah di September 2024 itu sudah trial," tukasnya. ● **yan**

Dinas Pendidikan DKI Cabut KJP Dua Siswa yang Tawuran

JAKARTA (IM) - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabut fasilitas Kartu Jakarta Plus (KJP) dua siswa. Keduanya tak lagi mendapat KJP karena terbukti terlibat tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Orang tua sudah mengakui anaknya terlibat tawuran. Maka sesuai peraturan dan juga ditegaskan oleh pimpinan maka KJP Plus terpaksa kita cabut, kita batalkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/7).

Purwosusilo menyebut sebenarnya ada enam siswa yang ditangkap karena tawuran pada 12 Maret 2023 dan 16 Juli 2023. Tetapi, empat orang di antaranya tidak terbukti ikut tawuran.

Hanya dua siswa yang KJP Plus dinonaktifkan karena terbukti terlibat langsung aksi tawuran. Dua siswa itu berasal dari sekolah di wilayah Jakarta Pusat.

"Kita langsung panggil pihak orang tua, siswa, dan sekolah. Orang tua kedua siswa mengakui anaknya ikut tawuran. Maka kita jatuhkan sanksi pencabutan KJP Plus," ujar Purwosusilo.

Menurut Purwosusilo sejak kebijakan pencabutan KJP Plus bagi siswa yang ketahuan tawuran dicabut sejauh ini aksi tawuran di Jakarta sudah jauh berkurang. Bahkan untuk mencegah tawuran bekerja sama dengan sekolah senantiasa melakukan pengetatan pengawasan terhadap aktivitas siswa.

"Sepanjang 2023, kita sudah komitmen untuk melakukan pengetatan pengawasan," ucap Purwosusilo

Ketika terjadi tawuran, kata Purwosusilo, pihaknya langsung mengecek kebenarannya, apakah ada keterlibatan anak sekolah pada peristiwa itu. Jika bukan anak sekolah, maka kewenangan berada di Kepolisian untuk melakukan penindakan.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan ada dua kasus pencabutan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pelajar karena terlibat tawuran. Heru mengimbau kepada seluruh siswa di DKI Jakarta untuk tidak melakukan tawuran.

Seluruh kepala sekolah dan guru juga memiliki peran penting untuk mengawasi peserta didiknya, sekaligus mengarahkan mereka agar bisa belajar dengan tekun.

Heru juga berharap pelajar di Jakarta lebih mementingkan masa depannya dibandingkan melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu. ● **yan**

Heru Tak Pernah Batalkan ITF

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan tidak anti dengan program Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau 'Intermediate Treatment Facility' (ITF). Terlebih lagi, program ITF sebagai salah satu langkah untuk mengolah sampah sudah tercantum dalam Perda 4 Tahun 2019 tentang Pengolahan Sampah. Ia menegaskan, Pemprov DKI memperbolehkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun ITF. Namun, perlu dicatat bahwa pembangunannya maupun pengoperasiannya nanti tanpa menggunakan APBD.

Heru menjelaskan, pihaknya keberatan dengan skema tipping fee yang harus digelontorkan oleh Pemprov DKI per ton sampah yang diolah lewat ITF. Dengan total timbulan sampah harian 7 ribu ton, Pemprov DKI diperkirakan harus membayar tipping fee ratusan miliar rupiah per tahunnya.

"Saya intinya boleh-boleh aja B to B tapi Pemda DKI tidak sanggup untuk berikan tipping fee," ujar Heru di Balai Kota, Jumat (28/7).

Oleh sebab itu, Heru pun lebih memilih membangun Refused Derived Fuel (RSF) Plant. Saat ini RDF pertama sudah beroperasi di TPST Bantargebang dengan kapasitas pengolahan sampah 2 ribu ton per hari.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI berencana juga membangun RDF di Rorotan dan Pegadungan. Masing-masing RDF akan berkapasitas 2.500 ton.

"Kami akan kembangkan RDF. Silahkan aja kalau ada yang mau kembangkan ITF tanpa tipping fee," kata Heru. ● **yan**

IDN/ANTARA

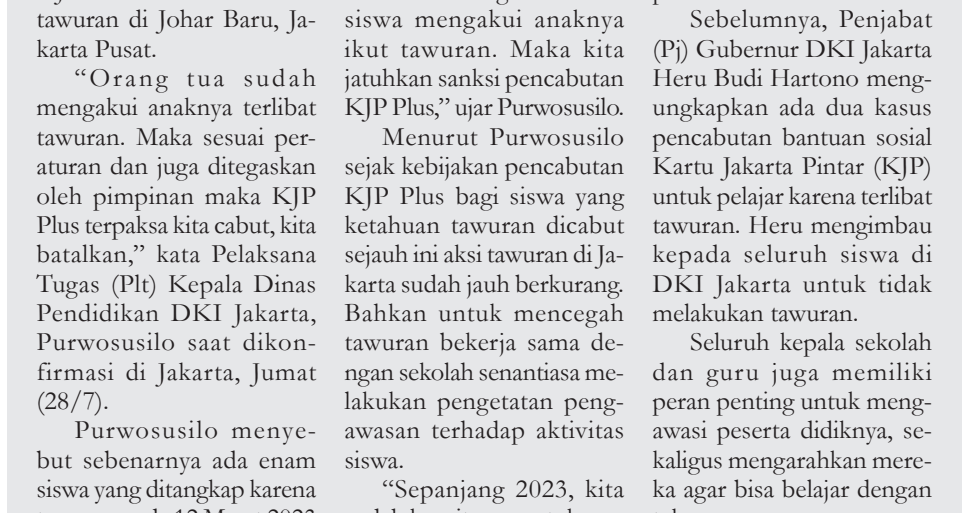

MURAL BERTEMAKAN PEMILU

Warga melintas di depan mural bertemakan Pemilu di Jalan Raya Margonda, Depok, Jumat (28/7). Mural tersebut berisikan pesan damai dan tolak politik uang jelang Pemilu tahun 2024.

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE

Bahwa perjanjian pembiayaan :

No.	Brand, Type, Color & Year	Tax	Transmission	Police Number
1	HONDA JAZZ GE8 1.5E PUTIH METALIK 2011	26/08/2023	A/T	B 2196 AM
2	TOYOTA RUSH 1.5 S (F800RE-GMGFJ) HITAM METALIK 2018	03/10/2021	M/T	B 1113 WZK
3	TOYOTA AGYA 1.2 G PUTIH 2019	11/05/2022	M/T	H 9065 UL
4	TOYOTA B401RA-GMZFJ (CALYA 1.2 G) PUTIH 2016	21/02/2024	M/T	H 1475 CL
5	KIA CARENS 2.0 (4x2) LX ABU ABU METALIK 2006	15/05/2019	A/T	B 1153 BVB
6	TOYOTA KIJANG INNOVA E HITAM METALIK 2011	24/12/2022	A/T	A 1285 VS
7	SUZUKI RW 415FX-OVER (4X2) ABU ABUMETALIK 2008	22/01/2023	A/T	F 1482 RM
8	HONDA FREED GB3 1.5 E (CKD) PUTIH MUTIARA 2009	03/10/2023	A/T	B 1766 UFN
9	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD PUTIH 2017	09/01/2024	A/T	D 1410 AGC
10	NISSAN SERENA ABU ABU TUA METALIK 2010	12/05/2023	A/T	D 1867 OQ
11	DAIHATSU B400RS-GMDEJ 1.0 M (SIGRA) HITAM 2020	20/05/2023	M/T	L 1892 VH
12	SUZUKI AVI414F DRZ 4X2 PUTIH METALIK 2014	14/11/2021	M/T	B 1757 ZFP
13	HYUNDAI H-1 2.4 HITAM METALIK 2008	01/08/2023	A/T	H 8888 BK

telah cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 8 Agustus 2023. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual dan di perhitungkan kembali.

Hormat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham **PT. TELLSCORE INTERNATIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), Nomor 20, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh Sandi Guntara Trisna, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan; para pemegang saham diantaranya telah menyetujui dan memutuskan membubarkan Perseroan dengan menunjuk Direksi sebagai Tim Likuidator Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidator Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

29 Juli 2023, Tim Likuidator

PT. TELLSCORE INTERNATIONAL INDONESIA (dalam likuidasi)

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi **PT SINAR MAHAKAM UTAMA MINING** ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan sebagian besar saham pada Perseroan. Pengambilalihan saham tersebut dilakukan secara langsung dari pemegang saham, dan akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan.

Bagi pihak-pihak yang memiliki piutang atau tagihan terhadap Perseroan atau keberatan atas pengalihan tersebut harap menyampaikan surat secara tertulis disertai bukti-bukti pendukung yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini, dan ditujukan kepada:

PT SINAR MAHAKAM UTAMA MINING
Gedung Bank Panin Lantai 5,
Jl Jend Sudirman, Kel Gelora, Kec Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10270
Telephone: (021) 7251344

Jakarta, 29 Juli 2023

PT SINAR MAHAKAM UTAMA MINING
Direksi Perseroan